SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG
KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang profesional, adil, dan efektif dalam pelayanan publik, perlu mengatur kelas jabatan dan nilai jabatan mempertimbangkan objektivitas, kesetaraan, dan penghargaan berbasis kinerja dan tanggung jawab;
b. bahwa dalam rangka penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan sesuai persetujuan hasil evaluasi jabatan, perlu menetapkan kembali kelas jabatan dan nilai jabatan dalam Peraturan Wali Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin npelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang menenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat epmbina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Nomenklatur Jabatan adalah nama jabatan yang menunjukan kedudukan seorang ASN dalam organisasi.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Peraturan Wali Kota ini ditujukan sebagai acuan pengangkatan dalam Jabatan dan pemberian tambahan penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

Pasal 3

Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Manajerial; dan
b. Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 4

(1) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
    a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
    b. Jabatan Administrator; dan
    c. Jabatan Pengawas.
(2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Staf Ahli Wali Kota;
    c. Asisten Sekretaris Daerah;
    d. Kepala Dinas; dan
    e. Kepala Badan.
(3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
(4) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(5) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Pasal 5

Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional; dan
b. Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

(1) Data Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(2) Data Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(3) Data Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pejabat fungsional yang mengalami perubahan kelas dan nilai Jabatan Fungsional yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, diberikan tambahan penghasilan pegawai dalam Jabatan Fungsional yang lama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,

1. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 34), sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 3); dan
2. Keputusan Wali Kota Nomor 000.8/316/2024 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 Desember 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DATA KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN UNTUK JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
	SEKRETARIAT DAERAH		
1.	SEKRETARIS DAERAH	15	3555
2.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN	13	2715
3.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	13	2715
4.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	2715
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	3030
6.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	12	2315
7.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	2315
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM	12	2315
9.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	3030
10.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	12	2315
11.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12	2315
12.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	2315
13.	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	9	1430
14.	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	9	1430
15.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	9	1430
16.	ASISTEN ADMINSITRASI UMUM	14	3030
17.	KEPALA BAGIAN UMUM	12	2315
18.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAH PIMPINAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT	9	1430
19.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	2315
20.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12	2315
21.	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL	9	1430
	SEKRETARIAT DPRD		
22.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14	3030
23.	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	12	2115
24.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
25.	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN	12	2115

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
	PERUNDANG-UNDANGAN		
26.	KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	12	2115
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
27.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	2865
28.	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12	2115
29.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
30.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
31.	KEPALA BIDANG PENEGAKAN	11	2045
32.	KEPALA SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA	9	1430
33.	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN	9	1430
34.	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	11	2045
35.	KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM, OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	9	1430
36.	KEPALA SEKSI PELINDUNGAN MASYARAKAT	9	1430
37.	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	11	2045
38.	KEPALA SEKSI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN	9	1430
39.	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	9	1430
	INSPEKTORAT DAERAH		
40.	INSPEKTUR	14	3030
41.	SEKRETARIS INSPEKTORAT	12	2140
42.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	1430
43.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
44.	INSPEKTUR PEMBANTU I	12	2165
45.	INSPEKTUR PEMBANTU II	12	2165
46.	INSPEKTUR PEMBANTU III	12	2165
47.	INSPEKTUR PEMBANTU IV/INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN KHUSUS	12	2165
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
48.	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	2865
49.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12	2115
50.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
51.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
52.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11	2045
53.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	11	2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
54.	KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PROGRAM	11	2045
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
55.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	14	2865
56.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	12	2225
57.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
58.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	11	2045
59.	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	9	1430
60.	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN	9	1430
61.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	11	2045
62.	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGELUARAN	9	1430
63.	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	9	1430
64.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11	2045
65.	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN	9	1430
66.	KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN	9	1430
67.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11	2045
68.	KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH	9	1430
69.	KEPALA SUBBIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	9	1430
70.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	11	2045
71.	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH	9	1430
72.	KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	9	1430
73.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	11	2045
74.	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	9	1430
75.	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	9	1430
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
76.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14	2865
77.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	2115
78.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
79.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
80.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN MUTASI	11	2045
81.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	11	2045
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
82.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	2865
83.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	2115
84.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
85.	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	11	2045
86.	KEPALA BIDANG POTIK DALAM NEGERI	11	2045
87.	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, DAN KARAKTER BANGSA	11	2045
88.	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	11	2045
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
89.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	2115
90.	KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	1430
91.	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	9	1430
92.	KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	9	1430
93.	KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN KONSTRUKSI	9	1430
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA		
94.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	14	2865
95.	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	12	2115
96.	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	1430
97.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
98.	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN	11	2045
99.	KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PELINDUNGAN ANAK	11	2045
100.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI, DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	11	2045
101.	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA,	11	2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
	KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA		
102.	KEPALA UPTD PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Kelas B)	8	1320
	DINAS PENDIDIKAN		
103.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	14	2865
104.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	12	2115
105.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
106.	KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11	2045
107.	KEPALA SEKSI FASILITIASI PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	9	1430
108.	KEPALA SEKSI PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN	9	1430
109.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	11	2045
110.	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	9	1430
111.	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN NON FORMAL	9	1430
112.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR	11	2045
113.	KEPALA SEKSI SEKOLAH DASAR	9	1430
114.	KEPALA SEKSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9	1430
	DINAS KESEHATAN		
115.	KEPALA DINAS KESEHATAN	14	2865
116.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	12	2115
117.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
118.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
119.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	11	2045
120.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	11	2045
121.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	11	2045
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN		
122.	KEPALA UPTD KLINIK PARU MASYARAKAT	9	1430
123.	KEPALA UPT INSTALASI FARMASI	8	1295
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
124.	KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	14	2865
125.	SEKRETARIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	12	2115
126.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
127.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
128.	KEPALA BIDANG PANGAN	11	2045
129.	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	11	2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
130.	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	11	2045
131.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERIKANAN	11	2045
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
132.	KEPALA UPTD RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (kelas B)	8	1320
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
133.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14	2865
134.	SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	2115
135.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
136.	KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN	11	2045
137.	KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN	11	2045
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
138.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	2865
139.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12	2115
140.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
141.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
142.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	2045
143.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11	2045
144.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	11	2045
	DINAS SOSIAL		
145.	KEPALA DINAS SOSIAL	14	2865
146.	SERKRETARIS DINAS SOSIAL	12	2115
147.	KEPALA BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
148.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	11	2045
149.	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	11	2045
150.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	11	2045
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
151.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14	2865
152.	SERKETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12	2115
153.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
154.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
155.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	11	2045
156.	KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	11	2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
157.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN	11	2045
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
158.	KEPALA UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (kelas B)	8	1320
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
159.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	2865
160.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12	2115
161.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
162.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
163.	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	11	2045
164.	KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA	11	2045
165.	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11	2045
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
166.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14	2865
167.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	2115
168.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
169.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
170.	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	11	2045
171.	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN SAMPAH, LIMBAH B3, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	11	2045
172.	KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	11	2045
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
173.	KEPALA UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (kelas B)	8	1320
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
174.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14	2865
175.	SERKETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12	2115
176.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
177.	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	11	2045
178.	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	11	2045
179.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	11	2045
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
180.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	2865

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
181.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	2115
182.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
	DINAS PERDAGANGAN		
183.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN	14	2865
184.	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN	12	2115
185.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
186.	KEPALA SUBBAGAIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
187.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	11	2045
188.	KEPALA BIDANG PASAR	11	2045
189.	KEPALA BIDANG PEDAGANG KAKI LIMA	11	2045
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN		
190.	KEPALA UPTD PASAR A (kelas A)	9	1430
191.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PASAR A (kelas A)	8	1320
192.	KEPALA UPTD PASAR B (kelas B)	8	1320
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
193.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	14	3030
194.	SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12	2115
195.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1455
196.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1455
197.	KEPALA BIDANG KOPERASI	11	2045
198.	KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH	11	2045
	DINAS PERHUBUNGAN		
199.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14	3030
200.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	12	2115
201.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1455
202.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1455
203.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN KELAIKAN KENDARAAN	11	2045
204.	KEPALA SEKSI KELAIKAN KENDARAAN	9	1430
205.	KEPALA SEKSI PELAYANAN ANGKUTAN DAN TERMINAL	9	1430
206.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	11	2045
207.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	9	1430
208.	KEPALA SEKSI BINA KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS	9	1430
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
209.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14	3030
210.	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN	12	2115

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
	PARIWISATA		
211.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1455
212.	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	11	2045
213.	KEPALA BIDANG PARIWISATA	11	2045
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
214.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	3030
215.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	2115
216.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1455
217.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1455
218.	KEPALA BIDANG PENGAIRAN	11	2045
219.	KEPALA BIDANG TATA RUANG	11	2045
220.	KEPALA BIDANG BINA MARGA	11	2045
221.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	11	2045
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
222.	KEPALA UPTD PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (kelas B)	8	1320
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
223.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	14	3030
224.	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	12	2115
225.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1455
226.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1455
227.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	11	2045
228.	KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN	11	2045
	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
229.	KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA (Kelas B)	8	1320
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (TIPE B)		
230.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	13	2715
231.	WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	12	2115
232.	KEPALA BAGIAN UMUM, ADMISNITRASI, DAN BARANG MILIK DAERAH	11	2045
233.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11	2045
234.	KEPALA BAGIAN BIAN PROGRAM, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	11	2045
235.	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN	12	2115
236.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK	11	2045
237.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN	11	2045
238.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK	11	2045
239.	KEPALA BIDANG PELAYANAN	11	2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
	KEPERAWATAN		
240.	KEPALA BIDANG PENUNJANG	11	2045
	KECAMATAN TINGKIR		
241.	CAMAT TINGKIR	12	2315
242.	SEKRETARIS KECAMATAN TINGKIR	11	2090
243.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1430
244.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1430
245.	KEPALA SEKSI PELAYANAN	9	1430
246.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9	1430
247.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	9	1430
248.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1430
	KELURAHAN SIDOREJO KIDUL		
249.	LURAH SIDOREJO KIDUL	9	1540
250.	SEKRETARIS KELURAHAN SIDOREJO KIDUL	8	1320
251.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
252.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
253.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN KALIBENING		
254.	LURAH KALIBENING	9	1540
255.	SEKRETARIS KELURAHAN KALIBENING	8	1320
256.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
257.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
258.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR		
259.	LURAH KUTOWINANGUN LOR	9	1540
260.	SEKRETARIS KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR	8	1320
261.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
262.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
263.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN KUTOWINANGUN KIDUL		
264.	LURAH KUTOWINANGUN KIDUL	9	1540
265.	SEKRETARIS KELURAHAN KUTOWINANGUN KIDUL	8	1320
266.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
267.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
268.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN GENDONGAN		
269.	LURAH GENDONGAN	9	1540
270.	SEKRETARIS KELURAHAN GENDONGAN	8	1320
271.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
272.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
273.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN TINGKIR LOR		
274.	LURAH TINGKIR LOR	9	1540
275.	SEKRETARIS KELURAHAN TINGKIR LOR	8	1320
276.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
277.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
278.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN TINGKIR TENGAH		
279.	LURAH TINGKIR TENGAH	9	1540
280.	SEKRETARIS KELURAHAN TINGKIR TENGAH	8	1320
281.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
282.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
283.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KECAMATAN SIDOREJO		
284.	CAMAT TINGKIR	12	2315
285.	SEKRETARIS KECAMATAN SIDOREJO	11	2090
286.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1455
287.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1455
288.	KEPALA SEKSI PELAYANAN	9	1455
289.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9	1455
290.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	9	1455
291.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1455
	KELURAHAN SIDOREJO LOR		
292.	LURAH SIDOREJO LOR	9	1540
293.	SEKRETARIS KELURAHAN SIDOREJO LOR	8	1320
294.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
295.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
296.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
	KELURAHAN SALATIGA		
297.	LURAH SALATIGA	9	1540
298.	SEKRETARIS KELURAHAN SALATIGA	8	1320
299.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
300.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
301.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN BUGEL		
302.	LURAH BUGEL	9	1540
303.	SEKRETARIS KELURAHAN BUGEL	8	1320
304.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
305.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
306.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN PULUTAN		
307.	LURAH PULUTAN	9	1540
308.	SEKRETARIS KELURAHAN PULUTAN	8	1320
309.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
310.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
311.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN KAUMAN KIDUL		
312.	LURAH KAUMAN KIDUL	9	1540
313.	SEKRETARIS KELURAHAN KAUMAN KIDUL	8	1320
314.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
315.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
316.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN BLOTONGAN		
317.	LURAH BLOTONGAN	9	1540
318.	SEKRETARIS KELURAHAN BLOTONGAN	8	1320
319.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
320.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
321.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KECAMATAN ARGOMULYO		
322.	CAMAT ARGOMULYO	12	2315
323.	SEKRETARIS KECAMATAN ARGOMULYO	11	2090
324.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1455
325.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN	9	1455

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
	KEPEGAWAIAN		
326.	KEPALA SEKSI PELAYANAN	9	1455
327.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9	1455
328.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	9	1455
329.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1455
	KELURAHAN LEDOK		
330.	LURAH LEDOK	9	1540
331.	SEKRETARIS KELURAHAN LEDOK	8	1320
332.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
333.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
334.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN CEBONGAN		
335.	LURAH CEBONGAN	9	1540
336.	SEKRETARIS KELURAHAN CEBONGAN	8	1320
337.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
338.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
339.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN NOBOREJO		
340.	LURAH NOBOREJO	9	1540
341.	SEKRETARIS KELURAHAN NOBOREJO	8	1320
342.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
343.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
344.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN RANDUACIR		
345.	LURAH RANDUACIR	9	1540
346.	SEKRETARIS KELURAHAN RANDUACIR	8	1320
347.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
348.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
349.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN KUMPULREJO		
350.	LURAH KUMPULREJO	9	1540
351.	SEKRETARIS KELURAHAN KUMPULREJO	8	1320
352.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
353.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
354.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN	8	1295

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
	MASYARAKAT		
	KELURAHAN TEGALREJO		
355.	LURAH TEGALREJO	9	1540
356.	SEKRETARIS KELURAHAN TEGALREJO	8	1320
357.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
358.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
359.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KECAMATAN SIDOMUKTI		
360.	CAMAT SIDOMUKTI	12	2315
361.	SEKRETARIS KECAMATAN SIDOMUKTI	11	2090
362.	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	1455
363.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1455
364.	KEPALA SEKSI PELAYANAN	9	1455
365.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9	1455
366.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	9	1455
367.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1455
	KELURAHAN DUKUH		
368.	LURAH DUKUH	9	1540
369.	SEKRETARIS KELURAHAN DUKUH	8	1320
370.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
371.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
372.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN MANGUNSARI		
373.	LURAH MANGUNSARI	9	1540
374.	SEKRETARIS KELURAHAN MANGUNSARI	8	1320
375.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
376.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
377.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN KECANDRAN		
378.	LURAH KECANDRAN	9	1540
379.	SEKRETARIS KELURAHAN KECANDRAN	8	1320
380.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
381.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
382.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295
	KELURAHAN KALICACING		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
383.	LURAH KALICACING	9	1540
384.	SEKRETARIS KELURAHAN KALICACING	8	1320
385.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1295
386.	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	8	1295
387.	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	8	1295

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DATA KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
1.	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	2135
2.	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	1735
3.	JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	1280
4.	JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA	8	1280
5.	JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR	8	1230
6.	JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	7	1005
7.	JF ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	2240
8.	JF ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	1770
9.	JF ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	1280
10.	JF PERENCANA AHLI MADYA	12	2170
11.	JF PERENCANAAHLI MUDA	10	1610
12.	JF PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1280
13.	JF ARSIPARIS AHLI MADYA	11	1930
14.	JF ARSIPARIS AHLI MUDA	9	1355
15.	JF ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	1280
16.	JF ARSIPARIS PENYELIA	8	1230
17.	JF ARSIPARIS MAHIR	7	1005
18.	JF ARSIPARIS TERAMPIL	6	740
19.	JF ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA AHLI MADYA	12	2115
20.	JF ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA AHLI MUDA	10	1615
21.	JF ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA AHLI PERTAMA	8	1280
22.	JF PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA	12	2310
23.	JF PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA	10	1685
24.	JF PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	8	1280
25.	JF PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	1930
26.	JF PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	1355
27.	JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	1280
28.	JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	1230

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
29.	JF PRANATA KOMPUTER MAHIR	7	1005
30.	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	740
31.	JF PRANATA KOMPUTER PEMULA	5	490
32.	JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA	12	2135
33.	JF PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	10	1735
34.	JF PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	8	1280
35.	JF AUDITOR AHLI MADYA	12	2250
36.	JF AUDITOR AHLI MUDA	10	1655
37.	JF AUDITOR AHLI PERTAMA	8	1280
38.	JF AUDITOR PENYELIA	9	1380
39.	JF AUDITOR MAHIR	7	940
40.	JF AUDITOR TERAMPIL	6	690
41.	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA	12	2145
42.	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA	10	1655
43.	JF PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	1280
44.	JF ANALIS PERDAGANGAN AHLI MADYA	12	2135
45.	JF ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA	10	1655
46.	JF ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	8	1205
47.	JF PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MADYA	12	2170
48.	JF PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA	10	1685
49.	JF PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	8	1280
50.	JF PENERA AHLI MADYA	12	2135
51.	JF PENERA AHLI MUDA	10	1685
52.	JF PENERA AHLI PERTAMA	8	1220
53.	JF PENERA PENYELIA	9	1500
54.	JF PENERA MAHIR	8	1150
55.	JF PENERA TERAMPIL	7	925
56.	JF PENGAMAT TERA AHLI PERTAMA	8	1205
57.	JF PENGAMAT TERA PENYELIA	8	1110
58.	JF PENGAMAT TERA MAHIR	7	925
59.	JF PENGAMAT TERA TERAMPIL	6	655
60.	JF PENGAMAT TERA PEMULA	5	505
61.	JF PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MADYA	11	1865
62.	JF PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA	9	1385
63.	JF PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	8	1205
64.	JF OPERATOR SIAK PENYELIA	8	1260
65.	JF OPERATOR SIAK MAHIR	7	1005
66.	JF OPERATOR SIAK TERAMPIL	6	740
67.	JF ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MADYA	11	1960
68.	JF ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MUDA	9	1460
69.	JF ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	8	1205
70.	JF PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	12	2240

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
71.	JF PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	10	1775
72.	JF PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1295
73.	JF PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	9	1505
74.	JF PENYULUH PERTANIAN MAHIR	8	1245
75.	JF PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	7	1095
76.	JF PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA	5	570
77.	JF MEDIK VETERINER AHLI MADYA	11	1930
78.	JF MEDIK VETERINER AHLI MUDA	9	1355
79.	JF MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	8	1280
80.	JF PARAMEDIK VETERINER PENYELIA	8	1230
81.	JF PARAMEDIK VETERINER MAHIR	7	1005
82.	JF PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	6	740
83.	JF PARAMEDIK VETERINER PEMULA	5	490
84.	JF ANALIS AKUAKULTUR AHLI MADYA	12	2240
85.	JF ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA	10	1640
86.	JF ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	8	1215
87.	JF TEKNISI AKUAKULTUR PENYELIA	8	1260
88.	JF TEKNISI AKUAKULTUR MAHIR	7	865
89.	JF TEKNISI AKUAKULTUR TERAMPIL	6	720
90.	JF TEKNISI AKUAKULTUR PEMULA	5	520
91.	JF PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MADYA	12	2170
92.	JF PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MUDA	10	1640
93.	JF PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	8	1235
94.	JF ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PENYELIA	8	1260
95.	JF ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAHIR	7	1020
96.	JF ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERAMPIL	6	720
97.	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	2135
98.	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	1735
99.	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	1280
100.	JF ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MADYA	12	2170
101.	JF ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	10	1610
102.	JF ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1280
103.	JF ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PENYELIA	8	1260
104.	JF ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MAHIR	7	1035
105.	JF ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL	6	670
106.	JF ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA	12	2170
107.	JF ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA	10	1735
108.	JF ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	8	1205

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
109.	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MADYA	11	1930
110.	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	9	1355
111.	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1280
112.	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PENYELIA	8	1230
113.	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MAHIR	7	1005
114.	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN TERAMPIL	6	740
115.	JF PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PEMULA	5	490
116.	JF PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MADYA	11	1930
117.	JF PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA	9	1355
118.	JF PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	8	1280
119.	JF PENGAWAS MUTU PAKAN PENYELIA	8	1230
120.	JF PENGAWAS MUTU PAKAN MAHIR	7	1005
121.	JF PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL	6	740
122.	JF PENGAWAS MUTU PAKAN PEMULA	5	490
123.	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MADYA	11	1930
124.	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA	9	1355
125.	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	8	1280
126.	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA	8	1230
127.	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK MAHIR	7	1005
128.	JF PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	6	740
129.	JF ANALISIS AKUAKULTUR AHLI MADYA	12	2240
130.	JF ANALISIS AKUAKULTUR AHLI MUDA	10	1640
131.	JF ANALISIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	8	1215
132.	JF TEKNISI AKUAKULTUR PENYELIA	8	1260
133.	JF TEKNISI AKUAKULTUR MAHIR	7	856
134.	JF TEKNISI AKUAKULTUR TERAMPIL	6	720
135.	JF TEKNISI AKUAKULTUR PEMULA	5	520
136.	JF ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MADYA	12	2235
137.	JF ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	10	1750
138.	JF ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1220
139.	JF PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA	8	1260
140.	JF PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR	7	1035
141.	JF PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	6	770
142.	JF PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	5	490
143.	JF PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MADYA	12	2135
144.	JF PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA	10	1735
145.	JF PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	8	1280

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
146.	JF PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MADYA	12	2240
147.	JF PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI MUDA	10	1700
148.	JF PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	8	1220
149.	JF PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MADYA	12	2240
150.	JF PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	10	1700
151.	JF PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	8	1220
152.	JF PENATA RUANG AHLI MADYA	12	2170
153.	JF PENATA RUANG AHLI MUDA	10	1720
154.	JF PENATA RUANG AHLI PERTAMA	8	1345
155.	JF PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MADYA	12	2240
156.	JF PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA	10	1700
157.	JF PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	8	1220
158.	JF PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PENYELIA	9	1490
159.	JF PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR MAHIR	7	1035
160.	JF PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL	6	685
161.	JF PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA	5	520
162.	JF PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PENYELIA	9	1490
163.	JF PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN MAHIR	7	1035
164.	JF PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	6	685
165.	JF PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMULA	5	520
166.	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MADYA	12	2240
167.	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	10	1700
168.	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	1220
169.	JF PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG KAWASAN PEMUKIMAN AHLI MADYA	12	2240
170.	JF PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PEMUKIMAN AHLI MUDA	10	1700
171.	JF PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PEMUKIMAN AHLI PERTAMA	8	1220
172.	JF PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PENYELIA	9	1490
173.	JF PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN MAHIR	7	1035

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
174.	JF PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	6	685
175.	JF PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMULA	5	520
176.	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MADYA	12	2240
177.	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	10	1700
178.	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	1220
179.	JF PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYELIA	9	1490
180.	JF PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN MAHIR	7	1035
181.	JF PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL	6	685
182.	JF PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMULA	5	520
183.	JF PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA	12	2310
184.	JF PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	10	1655
185.	JF PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	8	1280
186.	JF PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	12	2170
187.	JF PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	10	1655
188.	JF PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	8	1280
189.	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA	11	1870
190.	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	9	1480
191.	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	1295
192.	JF PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	9	1550
193.	JF PENATA LAKSANA BARANG MAHIR	8	1275
194.	JF PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	7	1070
195.	JF PAMONG BELAJAR AHLI MADYA	11	1930
196.	JF PAMONG BELAJAR AHLI MUDA	9	1355
197.	JF PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	8	1280
198.	JF PENILIK AHLI MADYA	11	1930
199.	JF PENILIK AHLI MUDA	9	1355
200.	JF PENILIK AHLI PERTAMA	8	1280
201.	JF PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA	11	1960
202.	JF PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA	9	1385
203.	JF GURU AHLI MADYA	11	1960
204.	JF GURU AHLI MUDA	9	1385
205.	JF GURU AHLI PERTAMA	8	1280
206.	JF PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11	1930
207.	JF PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9	1355
208.	JF PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8	1280
209.	JF ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA	8	1230
210.	JF ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR	7	1005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
211.	JF ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	6	740
212.	JF TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELIA	8	1260
213.	JF TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MAHIR	7	1035
214.	JF TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	6	770
215.	JF PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI MADYA	11	1930
216.	JF PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI MUDA	9	1355
217.	JF PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	8	1280
218.	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MADYA	11	1930
219.	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA	9	1555
220.	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	1280
221.	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN PENYELIA	8	1230
222.	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN MAHIR	7	1005
223.	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	6	740
224.	JF EPIDEMIOLOG KESEHATAN PEMULA	5	490
225.	JF ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	11	1930
226.	JF ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9	1355
227.	JF ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	1280
228.	JF TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	1930
229.	JF TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	1370
230.	JF TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	1295
231.	JF TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA	8	1245
232.	JF TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR	7	1020
233.	JF TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	6	755
234.	JF NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	1930
235.	JF NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	1555
236.	JF NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	1280
237.	JF NUTRISIONIS PENYELIA	8	1230
238.	JF NUTRISIONIS MAHIR	7	1005
239.	JF NUTRISIONIS TERAMPIL	6	740
240.	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	11	1930
241.	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9	1355
242.	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	1280
243.	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8	1230
244.	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR	7	1005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
245.	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	6	740
246.	JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PEMULA	5	490
247.	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11	1930
248.	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9	1355
249.	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	1280
250.	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	1230
251.	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7	1005
252.	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	740
253.	JF PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PEMULA	5	540
254.	JF PERAWAT AHLI MADYA	11	1960
255.	JF PERAWAT AHLI MUDA	9	1385
256.	JF PERAWAT AHLI PERTAMA	8	1310
257.	JF PERAWAT PENYELIA	8	1260
258.	JF PERAWAT MAHIR	7	1035
259.	JF PERAWAT TERAMPIL	6	770
260.	JF PERAWAT PELAKSANA PEMULA	5	520
261.	JF DOKTER AHLI UTAMA	14	2805
262.	JF DOKTER AHLI MADYA	12	2225
263.	JF DOKTER AHLI MUDA	10	1720
264.	JF DOKTER AHLI PERTAMA	9	1570
265.	JF APOTEKER AHLI MADYA	11	1945
266.	JF APOTEKER AHLI MUDA	9	1370
267.	JF APOTEKER AHLI PERTAMA	8	1295
268.	JF DOKTER GIGI AHLI MADYA	12	2225
269.	JF DOKTER GIGI AHLI MUDA	10	1670
270.	JF DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9	1370
271.	JF BIDAN AHLI MADYA	11	1930
272.	JF BIDAN AHLI MUDA	9	1355
273.	JF BIDAN AHLI PERTAMA	8	1280
274.	JF BIDAN PENYELIA	8	1230
275.	JF BIDAN MAHIR	7	1005
276.	JF BIDAN TERAMPIL	6	740
277.	JF BIDAN PEMULA	5	490
278.	JF ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	1245
279.	JF ASISTEN APOTEKER MAHIR	7	1020
280.	JF ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6	755
281.	JF ASISTEN APOTEKER PEMULA	5	505
282.	JF PEREKAM MEDIS AHLI MADYA	11	1960
283.	JF PEREKAM MEDIS AHLI MUDA	9	1385
284.	JF PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	8	1280
285.	JF PEREKAM MEDIS PENYELIA	8	1260
286.	JF PEREKAM MEDIS MAHIR	7	1035
287.	JF PEREKAM MEDIS TERAMPIL	6	770

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
288.	JF TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11	1960
289.	JF TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9	1385
290.	JF TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8	1310
291.	JF TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8	1260
292.	JF TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7	1035
293.	JF TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6	770
294.	JF RADIOGRAFER AHLI MADYA	11	1930
295.	JF RADIOGRAFER AHLI MUDA	9	1355
296.	JF RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	8	1280
297.	JF RADIOGRAFER PENYELIA	8	1260
298.	JF RADIOGRAFER MAHIR	7	1035
299.	JF RADIOGRAFER TERAMPIL	6	770
300.	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MADYA	11	1960
301.	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MUDA	9	1385
302.	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	8	1310
303.	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA	8	1260
304.	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR	7	1035
305.	JF TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	6	770
306.	JF FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11	1930
307.	JF FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9	1555
308.	JF FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	8	1280
309.	JF FISIOTERAPIS PENYELIA	8	1230
310.	JF FISIOTERAPIS MAHIR	7	1005
311.	JF FISIOTERAPIS TERAMPIL	6	740
312.	JF MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA	12	2170
313.	JF MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA	10	1720
314.	JF MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	8	1310
315.	JF PENGANTAR KERJA AHLI MADYA	12	2200
316.	JF PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	10	1750
317.	JF PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	8	1280
318.	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MADYA	11	2030
319.	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA	9	1385
320.	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	8	1310
321.	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENYELIA	8	1260
322.	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MAHIR	7	1035
323.	JF PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERAMPIL	6	770
324.	JF PEMBINA INDUSTRI AHLI MADYA	12	2170
325.	JF PEMBINA INDUSTRI AHLI MUDA	10	1730
326.	JF PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	8	1280
327.	JF INSTRUKTUR AHLI MADYA	12	2200
328.	JF INSTRUKTUR AHLI MUDA	10	1670
329.	JF INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	8	1265
330.	JF INSTRUKTUR PENYELIA	8	1230

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
331.	JF INSTRUKTUR MAHIR	7	1005
332.	JF INSTRUKTUR TERAMPIL	6	740
333.	JF SANDIMAN AHLI MADYA	12	2135
334.	JF SANDIMAN AHLI MUDA	10	1795
335.	JF SANDIMAN AHLI PERTAMA	8	1295
336.	JF SANDIMAN PENYELIA	9	1380
337.	JF SANDIMAN MAHIR	8	1155
338.	JF SANDIMAN TERAMPIL	7	990
339.	JF STATISTISI AHLI MADYA	11	1930
340.	JF STATISTISI AHLI MUDA	9	1355
341.	JF STATISTISI AHLI PERTAMA	8	1280
342.	JF ASISTEN STATISTISI PENYELIA	8	1230
343.	JF ASISTEN STATISTISI MAHIR	7	1005
344.	JF ASISTEN STATISTISI TERAMPIL	6	740
345.	JF MANGGALA INFORMATIKA AHLI MADYA	12	2170
346.	JF MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA	10	1780
347.	JF MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	8	1190
348.	JF PELATIH OLAHRAGA AHLI MADYA	11	1965
349.	JF PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA	9	1505
350.	JF PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	8	1280
351.	JF ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PENYELIA	8	1240
352.	JF ASISTEN PELATIH OLAHRAGA MAHIR	7	1005
353.	JF ASISTEN PELATIH OLAHRAGA TERAMPIL	6	755
354.	JF ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA	5	505
355.	JF PAMONG BUDAYA AHLI MADYA	11	1930
356.	JF PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	9	1355
357.	JF PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	8	1280
358.	JF PAMONG BUDAYA PENYELIA	8	1230
359.	JF PAMONG BUDAYA MAHIR	7	1005
360.	JF PAMONG BUDAYA TERAMPIL	6	740
361.	JF ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MADYA	12	2240
362.	JF ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA	10	1790
363.	JF ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	8	1310
364.	JF PEREKAYASA AHLI MADYA	12	2260
365.	JF PEREKAYASA AHLI MUDA	9	1355
366.	JF PEREKAYASA AHLI PERTAMA	8	1280
367.	JF PENELITI AHLI MADYA	12	2330
368.	JF PENELITI AHLI MUDA	9	1355
369.	JF PENELITI AHLI PERTAMA	8	1280
370.	JF TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN PENYELIA	9	1365
371.	JF TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN MAHIR	8	1110
372.	JF TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	6	820
373.	JF PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA	12	2345
374.	JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	10	1775
375.	JF PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	8	1295
376.	JF PEKERJA SOSIAL PENYELIA	8	1230

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
377.	JF PEKERJA SOSIAL MAHIR	7	1005
378.	JF PEKERJA SOSIAL TERAMPIL	6	740
379.	JF PEKERJA SOSIAL PEMULA	5	490
380.	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	12	2170
381.	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10	1610
382.	JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8	1280
383.	JF ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11	1960
384.	JF ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9	1355
385.	JF ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8	1280
386.	JF PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11	1960
387.	JF PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9	1355
388.	JF PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8	1280
389.	JF PEGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12	2220
390.	JF PEGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10	1695
391.	JF PEGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8	1270
392.	JF PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	11	1930
393.	JF PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	9	1355
394.	JF PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	8	1310
395.	JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA	11	2085
396.	JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	9	1445
397.	JF POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	8	1270
398.	JF POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	8	1320
399.	JF POLISI PAMONG PRAJA MAHIR	7	1095
400.	JF POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	6	745
401.	JF POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	5	5
402.	JF PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA	8	1275
403.	JF PEMADAM KEBAKARAN MAHIR	7	1000
404.	JF PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	6	695
405.	JF PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	5	630
406.	JF ANALIS KEBAKARAN AHLI MADYA	11	1990
407.	JF ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA	9	1415
408.	JF ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	8	1295
409.	JF ANALIS KEBENCANAAN AHLI MADYA	12	2155
410.	JF ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA	9	1435
411.	JF ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	8	1220
412.	JF PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA	12	2270
413.	JF PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	10	1700
414.	JF PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	8	1295
415.	JF PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MADYA	12	2240
416.	JF PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA	10	1700
417.	JF PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	8	1220
418.	JF FISIKAWAN MEDIS AHLI MADYA	11	1930
419.	JF FISIKAWAN MEDIS AHLI MUDA	9	1555
420.	JF FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	8	1280

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
421.	JF PENATA ANESTESI AHLI MADYA	11	2055
422.	JF PENATA ANESTESI AHLI MUDA	9	1600
423.	JF PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	8	1340
424.	JF ASISTEN PENATA ANESTESI PENYELIA	8	1290
425.	JF ASISTEN PENATA ANESTESI MAHIR	7	1015
426.	JF ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	6	835
427.	JF OKUPASI TERAPIS PENYELIA	8	1230
428.	JF OKUPASI TERAPIS MAHIR	7	1005
429.	JF OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	6	740
430.	JF PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA	11	1960
431.	JF PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA	9	1385
432.	JF PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	8	1310
433.	JF REFRAKSIONIS OPTISIEN PENYELIA	8	1260
434.	JF REFRAKSIONIS OPTISIEN MAHIR	7	1035
435.	JF REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	6	770
436.	JF TERAPIS WICARA PENYELIA	8	1230
437.	JF TERAPIS WICARA MAHIR	7	1005
438.	JF TERAPIS WICARA TERAMPIL	6	740
439.	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MADYA	12	2135
440.	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA	10	1735
441.	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	1280
442.	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PENYELIA	8	1230
443.	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MAHIR	7	1005
444.	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL	6	840
445.	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA	12	2135
446.	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA	10	1735
447.	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	8	1280
448.	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA	12	2195
449.	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA	10	1745
450.	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	8	1295

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DATA KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN UNTUK JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
1.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	890
2.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	690
3.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	490
4.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	490
5.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3	340
6.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	190
7.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	890
8.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	690
9.	PAMONG PEMERINTAHAN	7	890
10.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	7	890
11.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	7	890
12.	PRANATA KEWILAYAHAN	7	890
13.	KONSELOR SDM	7	890
14.	PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU	7	890
15.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	890
16.	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	690
17.	PENGAWAS TRANSPORTASI- TRANSPORTASI DARAT	7	890
18.	PETUGAS TRANSPORTASI- TRANSPORTASI DARAT	6	690
19.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	7	890
20.	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	6	690
21.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	7	890
22.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	3	340
23.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	190
24.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	6	690
25.	OPERATOR LABORATORIUM	6	690
26.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	890
27.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	690
28.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	7	890
29.	PENGENDALI KONTEN INTERNET	7	890
30.	DOKUMENTALIS HUKUM	6	690
31.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	6	690

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
32.	JURNALIS	6	690
33.	PENATA KEPROTOKOLAN	7	890
34.	PRANATA TRANTIBUM	5	490
35.	PENGELOLA TRANTIBUM	6	690
36.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	5	490
37.	OPERATOR ALAT BERAT	5	490

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN